

**ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEREMPUAN PADA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2009 DI KELURAHAN
PARUPUK TABING, KECAMATAN KOTO TANGAH, KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

WINDA MEILAN
Bp. 06. 193. 055



JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

ABSTRAK

Winda Meilan, 06193055, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Andalas Padang. Dengan Judul Skripsi: "Orientasi Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang". Dibimbing oleh: Dr.Sri Zulchairiyah, MA dan Irawati, MA. Skripsi ini terdiri dari 80 halaman dengan referensi 9 buku teori, 4 buku metode, 4 jurnal, 4 skripsi, dan 2 situs internet.

Dalam penelitian ini bermula dari kemunculan fenomena di daerah Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, bahwasanya terdapat mayoritas perempuan di dapil II (Koto Tangah dan Nanggalo), khususnya di Parupuk Tabing, namun caleg perempuan yang terpilih hanya satu orang saja. Penulis meneliti fenomena ini agar dapat mendeskripsikan dan menganalisis tentang Orientasi Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2009 di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Penelitian ini memberikan gambaran objektif tentang orientasi politik pemilih perempuan. Orientasi politik pemilih perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa orientasi pemilih perempuan itu berpikir untuk memilih atau menentukan pilihan kepada seorang caleg di Pemilu Legislatif 2009 di Kelurahan Parupuk Tabing. Orientasi ini mencakup ke dalam tiga komponen, yaitu Orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam langsung dengan informan. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Penelitian ini mengacu pada konsep Orientasi Politik, yang didalamnya terdapat faktor yang mempengaruhi, diantaranya : pendidikan politik, keluarga, identifikasi kepartaian, dan identifikasi kandidat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa pada Pemilu Legislatif 2009 yang lalu, pemilih perempuan di Kelurahan Parupuk Tabing cenderung berorientasi afektif yaitu yang konteksnya berdasarkan perasaan saja dan hal itu dikarenakan kurangnya pendidikan politik atau organisasi-organisasi politik yang menyebabkan pemilih perempuan kurang informasi dan pengetahuan tentang Pemilu Legislatif. Hasil ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci yang mayoritas memberi pendapat bahwa pemilih perempuan mempunyai dasar pemikiran dalam memilih kandidat cenderung di pengaruhi keluarga dan identifikasi kandidat.

Kata kunci : Orientasi Politik, Pemilih Perempuan, Pemilu Legislatif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlangsungnya reformasi pada Tahun 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru, telah membuka peluang pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Makna penting dari pelaksanaan pemilu itu sendiri bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan sistem demokrasi.¹ Hal inilah yang belum terlaksana pada Pemilu-pemilu di masa pemerintahan Orde Baru. Dimana pemilu pada masa Orde Baru tersebut sarat dengan manipulasi, selain itu Pemilu pada masa ini juga dijadikan alat legitimasi penguasa dimana proses dan struktur Pemilu dibuat sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk memunculkan wakil-wakil rakyat yang dapat menyalurkan aspirasi warga negara.²

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan Negara yang demokratis. Pemilu merupakan sarana untuk perbaikan lembaga politik yang akhirnya

¹ Koirudin. *Profil Pemilu 2009 (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2009)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004. Hal.187

² Muhammmad Hikam. *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi Di Indonesia*. Jakarta : Erlangga. 1999. Hal.129

berdampak pada perbaikan kehidupan politik dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam prakteknya Pemilu hanya merupakan formalitas yang sarat dengan kepentingan kelompok tertentu. Selama 9 kali melaksanakan Pemilu, perempuan yang jumlahnya separuh dari bangsa sangat kurang terwakili di lembaga perwakilan rakyat, akibatnya kebijakan publik dan program pembangunan kurang menyentuh kepentingan dan kebutuhan perempuan. Perempuan tertinggal di segala bidang kehidupan dan kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemajuan seluruh bangsa.

Pasal 5 Ayat (1) UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, yang berisi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Tidak tampak berbeda dengan Pemilu 2004, tetap mendasarkan pada prinsip proporsional atau perwakilan berimbang. Artinya, suatu daerah pemilihan diwakili sejumlah wakil yang didapat dari perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu. Diadakannya Pemilu secara langsung ini para pemilih pada Pemilu legislatif dapat mengetahui dengan pasti siapa-siapa saja calon legislatif yang terdaftar dan yang akan mereka pilih karena seperti yang dikatakan oleh Niemi dan Weisberg (1876),³ bahwa Pemilu tidak hanya sekedar memberikan hak warga negara untuk memilih pemerintahan, tetapi juga berfungsi untuk membatasi para pimpinan politik agar berperilaku sebaik mungkin supaya dapat dipilih kembali dalam Pemilu berikutnya. Oleh karena itu, Pemilu merupakan sarana penghubung

³ Josef Kristiadi. *Pemilu dan Perilaku Memilih*. Disertasi FIS UGM. Yogyakarta. 1993. Hal. 25

antara kepentingan masyarakat dan kebijakan umum. Pemilu juga merupakan instrumen politik agar konflik, distribusi, dan pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara tertib dan damai.

Partisipasi perempuan dalam politik juga bisa dilakukan dalam pemilu yakni sebagai pemilih. Perempuan sebagai pemilih menjadi faktor penunjang terpilihnya caleg perempuan, karena pada dasarnya pemilih perempuan memilih kandidat perempuan adalah untuk mewakili hak suara mereka demi kepentingannya di bidang politik. Perempuan secara global saat ini telah memiliki hak untuk memilih. Meskipun perempuan belum memberi dampak yang terlalu besar, terutama dalam hal memainkan peran karena perempuan dalam politik masih dalam posisi minoritas.⁴ Perempuan sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif diperkirakan akan ikut memilih perempuan juga karena banyaknya calon legislatif perempuan, namun pada kenyataannya tidak demikian sehingga tidak bisa diketahui pasti orientasi perempuan dalam memilih. Sebelum terjadinya partisipasi politik, tentunya pemilih memiliki orientasi politik untuk memilih caleg yang pemahamannya masih dalam pikiran pemilih tersebut dan abstrak.

Orientasi individu terhadap obyek politik dapat dipandang dari tiga hal,⁵ yaitu orientasi kognitif berupa pengetahuan dan keyakinan, orientasi afektif yang merupakan perasaan terkait dan keterlibatan atau sejenisnya, dan orientasi evaluatif mengenai penilaian dan opini tentang obyek politik. Oleh karena itu

⁴ Mansour Fakhri. *Analisis Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997. Hal.158

⁵ <http://globalisasi.wordpress.com/2007/01/06/budaya-politik-sebuah-eksplorasi-konsep/>. Akses Tanggal 16 -07-2011

seorang individu mungkin memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinya dan masalah-masalah dari kebijakannya. Inilah yang disebut dimensi kognitif. Namun ia mungkin memiliki perasaan alienasi atau penolakan terhadap sistem. Mungkin keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Mungkin ia tak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem, Itulah yang disebut dimensi afektif. Akhirnya seseorang mungkin memiliki penilaian moral terhadap sistem. Barangkali norma-norma demokrasinya mendorong dia menilai sistem sebagai tidak cukup responsif terhadap tuntutan politik atas norma-norma etiknya mendorong dia mengecam tingkat korupsi dan nepotisme. Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasi dalam berbagai cara. Obyek politik yang dimaksud disini adalah calon legislatif dan sistemnya adalah Pemilu.

Orientasi politik ini merupakan perilaku 'dalam' individu, sedangkan perilaku 'luar'nya berupa kegiatan. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.⁶ Orientasi politik masih dalam tataran pemikiran individu yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik yaitu dalam hal memilih pada Pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi politik. Orientasi politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih perempuan dalam memilih. Tentu saja pada dasarnya

⁶ Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.1992. Hal.141

pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya. Dalam penelitian ini, hal yang masih dalam pemikiran individu perempuan inilah yang akan dikaji lebih mendalam dalam hal memilih calon-calon legislatif.

Kota Padang yang merupakan Ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 11 kecamatan, yang mana masing-masing kecamatan memiliki jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) perempuan lebih banyak di banding laki-laki. Jumlah pemilih perempuan terbanyak terletak di kecamatan Koto Tengah. Pernyataan jumlah DPT perempuan lebih banyak dari laki-laki dapat dibuktikan pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Pelaksana Dan Daftar Pemilih Tetap Jumlah Badan
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
Dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2009

Provinsi : Sumatera Barat
Kota : Padang

No.	Kota Padang Kecamatan	JML			Pemilih (DPT)		
		PPK	PPS	TPS PADA DPT	LK	PR	JML
1	Padang Barat	1	10	133	17.733	18.857	36.590
2	Padang Utara	1	7	147	21.626	22.277	43.903
3	Koto Tengah	1	13	367	51.837	53.387	105.224
4	Nanggalo	1	6	133	17.824	19.149	36.973
5	Kuranji	1	9	293	39.872	40.540	80.412
6	Pauh	1	9	132	17.632	17.885	35.517
7	Padang Timur	1	10	189	26.590	28.274	54.864
8	Padang Selatan	1	12	141	20.041	20.753	40.794
9	Bungus Teluk Kabung	1	6	58	7.363	8.026	14.789
10	Lubuk Bagalung	1	15	250	33.619	34.155	67.774
11	Lubuk Kilangan	1	7	99	15.518	15.656	31.174
TOTAL		11	104	1.942	269.655	278.359	548.014

Sumber: KPU Kota Padang 2009

Tabel 1.1 berisi jumlah DPT 11 kecamatan yang ada di kota Padang. Jumlah DPT terbanyak berada pada kecamatan Koto Tengah yang berjumlah 105.224 pemilih, dimana pemilih perempuan terbanyak juga terdapat di kecamatan Koto Tengah sejumlah 53.387 pemilih. Untuk memfokuskan penelitian terhadap orientasi politik pemilih perempuan maka peneliti memilih kelurahan yang mempunyai DPT perempuan terbanyak di kecamatan Koto Tengah yaitu kelurahan Parupuk Tabing :

Tabel 1.2

DPT Per PPS Kecamatan Koto Tengah Kota Padang

No	Kelurahan (PPS)	Banyak TPS	Lk	Pr	Jumlah
1	Airpach	20	2.416	2.525	4.924
2	Balai gadang	28	4.002	3.983	8.980
3	Bt. Kabung gantung	29	4.085	4.345	6.097
4	Batipuh panjang	27	3.804	3.958	6.992
5	Bungo pasang	31	4.201	4.248	7.883
6	Dadok tunggul hitam	36	4.849	5.022	9.988
7	Koto panjang ikur koto	22	3.286	3.338	7.207
8	Koto pulai	6	838	840	1.568
9	Lubuk buaya	45	6.145	6.396	12.509
10	Lubuk minturun	15	2.458	2.400	6.801
11	Parupuk tabing	47	7.256	7.490	14.746
12	Padang sarai	36	4.919	5.220	11.223
13	Pasia nan tigo	25	3.578	3.622	7.200
	JUMLAH	367	51.837	53.387	105.224

Sumber : KPU kota Padang 2009

Di kecamatan Koto Tengah yang terdiri dari 13 kelurahan ini terlihat perbedaan masing-masing Kelurahan dan DPT terbanyak terletak di Kelurahan Parupuk Tabing. Berdasarkan kajian penelitian ini, maka dipilih kelurahan

parupuk tabing sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah DPT perempuan terbanyak yaitu 7.490 pemilih. Sementara itu, Kelurahan Parupuk Tabin yang merupakan pembagian dari daerah pemilihan II bersama dengan Kecamatan Nanggalo. Peneliti juga menambahkan DPT di Kecamatan Nanggalo untuk menyempurnakan data khusus daerah pemilihan II saja :

Tabel 1.3

DPT Per PPS Kecamatan Nanggalo Kota Padang

No	Kelurahan (PPS)	Banyak TPS	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Tabing Bandang Gadang	10	1.212	1.257	2.474
2	Kampung Lapai	21	2.997	3.366	6.363
3	Gurun Laweh	6	848	894	1.742
4	Kampung Olo	15	2.148	2.230	4.378
5	Kurao Pagang	26	3.426	3.540	6.966
6	Surau Gadang	55	7.188	7.862	15.050
	JUMLAH	367	17.824	19.149	36.973

Sumber : KPU kota Padang 2009

Tabel 1.3 diatas adalah DPT di Kecamatan Nanggalo yang memiliki 6 kelurahan yang memiliki jumlah DPT 36.973 pemilih. Pada masing-masing Kelurahan juga memiliki jumlah DPT perempuan lebih banyak dibanding DPT laki-laki, namun selisih banyaknya DPT perempuan tidak terlalu mencolok dengan DPT laki-laki.

Berdasarkan data dari sekian banyak pemilih di Kelurahan Parupuk Tabin belum bisa dipastikan bahwa semua pemilih mendatangi TPS untuk

memilih. Berikut jumlah DPT yang ikut memilih dalam pemilihan legislatif 2009 di kelurahan Parupuk Tabing, kecamatan Koto Tangah, kota Padang :

Tabel 1.4

Daftar Jumlah Pemilih Di Kelurahan Parupuk Tabing

Pemilih yang menggunakan hak pilih	9.211
Pemilih Tambahan	16
Suara Sah	8.716
Suara Tidak Sah	511

Sumber : KPU Kota Padang dan PPS Parupuk Tabing

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah DPT yang ada di Parupuk Tabing yaitu 14.094 pemilih, namun yang ikut berpartisipasi memilih dalam pemilihan legislatif 2009 hanya 9.066 pemilih, dan juga telah ditampilkan jumlah suara sah dan tidak sah.

Selain kesempatan perempuan dalam Pemilu legislatif sebagai pemilih, perempuan juga berpartisipasi saat pemilu dalam hal sebagai calon legislatif, karena penelitian ini dilakukan di kecamatan Koto Tangah yang mana merupakan daerah pemilihan 2 bersama dengan Kecamatan Nanggalo, maka data yang ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan 2. dapat kita lihat pada tabel 1.5 di bawah ini bahwa adanya partisipasi perempuan sebagai calon legislatif yang di usung dari partai-partai:

Tabel 1.5

Daftar Jumlah Caleg Perempuan Pemilu Legislatif 2009 Daerah Pemilihan II

No.	Nama Partai	Jumlah Caleg Tetap Perempuan
1	Partai Karya Peduli Bangsa	1
2	Partai Peduli Rakyat Nasional	1
3	Partai Gerindra	3
4	Partai Hanura	3
5	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3
6	Partai Keadilan Sejahtera	3
7	Partai Amanat Nasional	4
8	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1
9	Partai Kedaulatan	2
10	Partai Kebangkitan Bangsa	1
11	Partai Pemuda Indonesia	1
12	Partai Karya Perjuangan	1
13	Partai Matahari Bangsa	3
14	Partai Demokrasi Kebangsaan	1
15	Partai Republika Nusantara	1
16	Partai Pelopor	1
17	Partai Golongan Karya	4
18	Partai Persatuan Pembangunan	4
19	Partai damai Sejahtera	2
20	Partai Bulan Bintang	3
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
22	Partai Bintang Reformasi	4
23	Partai Demokrat	3
24	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1
25	Partai Serikat Indonesia	1
JUMLAH		57

Sumber : KPU kota Padang 2009

Dari 34 partai peserta Pemilu legislatif 2009 di daerah pemilihan 2, hanya 25 partai yang mengajukan caleg perempuan dan selebihnya atau 9 partai lainnya

hanya mengajukan caleg laki-laki.⁷ Berarti dari 25 partai jika ditotal secara keseluruhan, ada 57 caleg perempuan yang ikut serta dalam pemilu legislatif untuk daerah pemilihan 2 saja.

Pada Pemilu Legislatif 2009 yang diadakan di kota Padang belum terlihat adanya partisipasi pemilih perempuan untuk memilih calon Legislatif perempuan yang diperkirakan dapat mengangkat derajat perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa di Kelurahan Parupuk Tabing memiliki jumlah DPT terbanyak diantara kelurahan lainnya, namun hal yang diharapkan tersebut belum bisa terjadi, Terbukti bahwa anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk daerah pemilihan 2 (Koto Tangah dan Nanggalo) yang terpilih hanya satu orang saja. Tergali juga bahwa selama ini basis perempuan belum secara independen memilih sesuai pengetahuan yang dimiliki, namun beberapa alasan yang dikemukakan bahwa selama ini memilih hanya karena mengikuti pilihan suami, saudara, teman, atau lingkungan.⁸ Untuk lebih jelasnya bahwa di daerah pemilihan 2 yang mayoritas pemilih perempuan ini, hanya 1 calon legislatif yang terpilih yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

⁷ Partai yang tidak mencalonkan caleg perempuan (Partai Persatuan Daerah, Partai Nasional Indonesia Marhaenis, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Patriot, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Merdeka, Partai Buruh).

⁸ Hasil Survey awal dengan Lusty (pemilih perempuan di Kelurahan Parupuk Tabing),

Tabel 1.6

**Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum 2009 Di Daerah Pemilihan II (Koto Tengah dan Nanggalo)**

Kota Padang

Daerah Pemilihan : Padang 2

No.	Partai Politik	No. Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1.	Partai Hanura	3	Osman Ayub	641	I
2.	Partai Gerindra	2	Mhd. Fauzi	645	I
3.	Partai Keadilan	1	Muharlion, S.Pd	1992	I
4.	Sejahtera	4	Pun Ardi. S.Ag	1318	II
5.	Partai Keadilan	5	Joni Ismed	1293	I
6.	Sejahtera	1	Jumadi, SH	1817	I
7.	Partai Amanat	2	Jawardi, SE	831	I
8.	Nasional	1	Azwar Siry, SH,	6203	I
9.	Partai Golkar	2	MM	1969	II
10.	PPP	3	Gustin Pramona	1558	III
11.	Partai Demokrat	5	Drs. H.	1310	IV
	Partai Demokrat		Syamsusulin, SH		
	Partai Demokrat		Rroni Candra, Spd		
	Partai Demokrat				

Sumber : KPU kota Padang 2009

Pada tabel 1.6 di atas merupakan daftar terpilih sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten atau Kota pada pemilihan umum 2009 untuk kawasan daerah pemilihan II yaitu kecamatan Koto Tengah dan Nanggalo. Dari ke sebelas calon terpilih tersebut berasal dari 7 partai berbeda (Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar. Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat). Calon

perempuan terpilih berasal dari Partai Demokrat yaitu Gustin Pramona, dengan hasil suara 1969 dan menduduki peringkat suara sah ke II.

Dilihat dari hasil perolehan suara untuk perempuan yang masih sangat minim, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa belum bisa dipastikan apa orientasi pemilih perempuan dalam berpartisipasi untuk memilih caleg. Sikap dan orientasi yang khas pemilih perempuan dalam memilih itulah yang disebut dengan budaya politik. Orientasi politik yang bersifat individual ini yaitu dikhususkan kepada pemilih perempuan tidaklah berarti kita menganggap masyarakat (pemilih perempuan) akan cenderung bergerak kearah individualisme tetapi melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan.⁹ Proses pendidikan politik menjadi satu kebutuhan untuk membentuk pemilih perempuan menjadi lebih rasional (sadar akan pilihannya).

Dari eksplorasi yang dilakukan, mayoritas pemilih perempuan belum mengerti urgensi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bagi mereka, tidak masalah caleg laki-laki atau perempuan asalkan mau mengerti penderitaan rakyat. Namun pemilih perempuan bisa sepakat ketika dijelaskan pentingnya perempuan ada di lembaga legislatif. Wakil perempuan yang diinginkan adalah perempuan secara ideologis, yaitu perempuan yang memiliki kemampuan

⁹ <http://y0645.wordpress.com/2009/07/26/pengertian-budaya-politik/Benedict> R. O'G Andersons. diakses pada Tgl 12-12-2010

intelektual dan emosional serta mampu memperjuangkan agenda perempuan.¹⁰ Perempuan memilih berdasarkan orientasi yang dimilikinya. Jika orientasinya Kognitif, pemilih perempuan tentu saja sudah memiliki pengetahuan mengenai siapa calon yang akan dipilihnya nanti serta mengerti dan sadar akan pilihannya. Jika orientasinya Afektif, pemilih dalam memilih dan menentukan pilihan berdasarkan perasaan yang dimilikinya terhadap calon-calon baik itu menerima dan menolak (tidak sesuai dengan perasaannya). Dan terakhir jika orientasinya Evaluatif, pemilih sudah bisa menilai dan berpendapat tentang Pemilu itu dan terhadap calonnya, dan bahkan sudah menerapkan nilai-nilai dan norma-norma demokrasi dalam Pemilu.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Budaya politik mengandung tiga komponen yaitu, orientasi kognitif berupa pengetahuan dan kepercayaan terhadap politik, orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya dan penampilannya, serta orientasi evaluatif yaitu penilaian atau pendapat tentang obyek-obyek politik. Berdasarkan isu diskriminasi gender yang ada dan dengan alasan banyaknya jumlah caleg perempuan yang terjun pada Pemilu Legislatif, maka peneliti lebih memfokuskan penelitian ini kepada pemilih perempuan saja. Jika dilihat pada latar belakang

¹⁰ Maya Rostanti dan Susana Dewi. *Jurnal Perempuan (Politik Dan Keterwakilan Perempuan)*. Jakarta. 2004. Hal.9

¹¹ Ronald H Chilcote. *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta : Rajawali Perss. 2007. Hal.302

telah dijelaskan bahwa banyaknya DPT perempuan di kelurahan parupuk tabing kecamatan Koto Tangah dapat menjawab rumusan masalah :

“Apa orientasi politik pemilih perempuan dalam Pemilu legislatif 2009 di kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui orientasi politik pemilih perempuan dalam memilih di pemilihan umum legislatif 2009, serta mendeskripsikan dan menganalisis orientasi pemilih perempuan dimana orientasi politik terbagi kedalam tiga komponen yaitu :

1. komponen kognitif mengenai pengetahuan pemilih perempuan,
2. komponen afektif mengenai perasaan pemilih perempuan,
3. komponen evaluatif mengenai penilaian dan pendapat pemilih perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara akademis

Dapat memberikan masukan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan pemilih perempuan dalam pemilu.

1.4.2 Secara praktis

Dapat memberikan pemahaman kepada calon legislatif perempuan dan partai politik dalam usaha meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilu, melalui proses perbaikan sosialisasi politik dan pendidikan politik kepada warga negara.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemilihan umum merupakan sarana yang digunakan oleh negara demokrasi untuk memilih pemimpin mereka. Pada Pemilu Legislatif 2004 lalu, ada sebuah kebijakan baru dengan dikeluarkannya kuota 30% untuk perempuan dalam lembaga legislatif. Dengan adanya kebijakan ini di harapkan perempuan Indonesia lebih aktif lagi berpartisipasi dalam politik. Salah satu bentuk partisipasi kaum perempuan tersebut adalah dengan ikut serta sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif 2009.

Orientasi politik pemilih perempuan adalah suatu produk yang tidak hadir dengan begitu saja, terdapat faktor-faktor pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang mempengaruhi orientasi politik seorang pemilih perempuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pemilih perempuan di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah di Kota Padang pada Pemilu Legislatif 2009 yang lalu, ditemukan bahwa dari ke-tiga tipe orientasi politik yang di teliti terdapat orientasi afektif yang sangat berpengaruh dalam perilaku politik pemilih perempuan dalam memilih dikarenakan banyaknya pemilih perempuan yang mempunyai dasar pemikiran dihubungkan dengan perasaannya, seperti : memiliki rasa suka dan tidak suka karena melihat penampilan caleg tersebut, berpikiran bahwa perempuan tidak pantas untuk masuk ke dalam dunia politik, serta dalam memilih tidak rasional dan

hanya mengikuti pilihan orang lain, bukan dari pengetahuannya tentang Pemilu atau kewajibannya pada Pemilu.

Orientasi politik seorang pemilih didapat sejak dari dalam keluarga dan dari lingkungan sekitar dimana pemilih tersebut sering bersosialisasi, bahkan juga dari informasi yang di dapat baik itu dari media cetak ataupun media elektronik. Selain itu pilihan-pilihan politik seseorang juga didapat dari pengetahuannya mengenai sebuah Partai dan caleg serta kiprahnya yang diketahui oleh informan tersebut.

6.2 Saran

Hal terpenting dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah daerah setempat yang berhubungan dengan Pemilihan Umum dapat memberikan pendidikan politik (*civic education*) dan sosialisasi politik kepada pemilih, terutama pemilih perempuan yang masih sangat minim kesadarannya tentang Pemilu Legislatif agar pemilih perempuan mempunyai kesadaran berpolitik. Hal itu terjadi dikarenakan tidak adanya kepercayaan pemilih perempuan kepada wakil-wakil rakyat yang mempunyai segudang janji yang tidak terlaksana.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan penelitian di dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi mengenai orientasi politik pemilih perempuan yang tidak hanya di lingkup Kelurahan saja seperti penelitian ini, tetapi untuk mengetahui hasil yang lebih signifikan pada tingkat kotamadya/kabupaten atau provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan kepada partai politik dan calegnya agar lebih memfokuskan target kepada pemilih perempuan yang menjadi mayoritas di setiap Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Chilcote, Ronald H. 2007. *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta ; PT.Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hikam, Muhammad. 1999. *Politik Kewarganegaraan Landasan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta ; Reinika.
- Koirudin. 2004. *Profil Pemilu 2009 (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil, dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2009)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kristiadi, Josef. 1993. *Pemilu dan Perilaku Memilih : Suara Perempuan dalam Pemilu 1999 di Kota Padang*. Tesis tidak untuk Diterbitkan. Padang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosda Karya.
- Ollenburger, Jone, C. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta : Riineka Cipta.
- Ridwan, Muhammad. 2009. *Orientasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pasca Mukernas Bali Tahun 2008*. Padang : Jurusan Ilmu Politik. FISIP. Universitas Andalas.
- Rostanti, Maya dan Susana Dewi. 2004. *Jurnal Perempuan (Politik dan Keterwakilan Politik Perempuan)*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : PT.Tiara Wacana.

Salim, Hairus. 2004. *Islam dan Pemilu*. Yogyakarta : Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial.

Satroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang.

Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suryatmojo dan Didik Gunawan Soeharto. 2009. *Jurnal Women and Political Party*. Surakarta : UNS.

Suryanef dan Al - Rafni. 2002. *Kajian Tentang Perilaku Memilih : Suara Perempuan dalam Pemilu 1999 di Kota Padang*. Padang : FIS UNP.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wiska, Nofal. 2005. *Orientasi Politik Muhammadiyah Sumatera Barat Pasca Reformasi 1998*. Padang : Jurusan Ilmu Politik. FISIP. Universitas Andalas.

Yoserizal dan Asrinaldi. 2009. *Preferensi dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang Perkotaan di Kota Padang terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilu*. Padang: Jurnal Politik UNAND.

<http://y0645.wordpress.com/2009/07/26/pengertian-budaya-politik/Benedict> R. O'G Andersons tentang Budaya Politik, Di akses pada Tgl 12-12-2010.

<http://globalisasi.wordpress.com/2007/01/06/budaya-politik-sebuah-eksplorasi-konsep/> tentang Budaya Politik, Di akses Tgl 16 -07-2011.

<http://www.jappy.8m.com/custom3.html> tentang Perempuan dan Politik, Di akses Tgl 24-7-2011.

www.KPU.go.id, Di akses pada Tgl 26-7-2011.